

ORIENTASI PERILAKU POLITIK TRADISIONAL

Jubair Situmorang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

jubairsitumorang@iain-ternate.ad.id

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan tentang perilaku keberagamaan muslim tradisional, (2) menganalisis perilaku politik muslim tradisional. Adapun masalah kajian ini adalah bagaimana Orientasi Perilaku Politik Muslim Tradisional. Agar pembahasannya lebih mendalam, maka pokok masalah di atas dijabarkan kedalam sub pokok masalah, yaitu: bagaimana perilaku keberagamaan muslim tradisional, dan bagaimana orientasi perilaku politik muslim tradisional. Agar tujuan kajian ini tercapai secara maksimal, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan: historis, sosiologis, teologis dan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan perilaku keberagamaan muslim tradisional dipengaruhi pemikiran keagamaannya berkuat pada pemahaman yang literal sering sekali berdampak pada implementasi ajaran-ajaran agama yang cenderung *rigid*, doktrinal, kurang terbuka terhadap perkembangan pemikiran. Bahkan terkadang memandang pemahaman diluar komunitasnya sebagai kelompok yang keliru. Cenderung menjaga ajaran-ajaran yang diterima secara turun-temurun, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya praktik sinkretisme dalam praktik keagamaannya.. Cenderung mempertahankan tradisi sebagai bagian aktivitas keagamaannya. Bahkan pengaruh kebudayaan lokal cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, secara kultural dapat dikatakan bersifat sinkretik. Paradigma keberagamaan ini juga mempengaruhi perilaku politik muslim tradisional yang ditandai dengan pembentukan sikap dan perilaku politik dipengaruhi oleh otoritas dogmatis atau kebenaran yang bersifat mutlak, otoritas terarah atau ketuntasan pengaturan, pelembagaan otoritas atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.

Kata Kunci: Orientasi, perilaku, politik, muslim tradisional

Abstract

The purpose of this study is to (1) describe the traditional Muslim religious behavior (2) analyze the traditional Muslim political behavior. The problem of this study is how to

Orient Traditional Muslim Behavior. In order to have a deeper discussion, the subject matter above is elaborated into sub-problems, namely: how is the traditional Muslim religious behavior, and how is the orientation of traditional Muslim political behavior. In order to achieve the objectives of this study maximally, in its implementation, historical, sociological, theological, and phenomenological approaches are used. The results showed that Muslim religious behavior influenced by religious thought dwells on literal understanding which often has an impact to the implementation of religious thought that tend to be rigid, doctrinal, and lack of openness to the development of thought. In fact, sometimes they see the understanding outside their community as the mistaken group. It tends to keep the teachings or doctrines that are accepted hereditary, so it is possible to have the practice of syncretism in religious practice. It tends to maintain tradition as the part of religious activities. Even the influence of local culture is quite strong in the implementation of religious rituals, culturally it can be said to be syncretic. This religious paradigm also influences traditional Muslim political behavior marked by the formation of political attitudes and behavior influenced by dogmatic authority or absolute truth, directed authority or completeness of regulation, institutionalization of authority or the integration of understanding and use of absolute truth in the formulation of rules that strengthen religious structures.

Keyword : Orientation, political behavior, traditional Muslim.

A. Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi, bangsa Indonesia telah melewati tiga fase kepemimpinan yaitu masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Prosesi suksesi dalam tiga fase kepemimpinan dilakukan melalui pemilu.¹ Fakta ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sedang berlangsung, sekaligus menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia secara terus menerus berinovasi untuk mengantarkan bangsa Indonesia kepada kehidupan politik yang semakin demokratis. Praktek demokrasi di atas tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat muslim -sebagai komunitas mayoritas bangsa Indonesia- terlibat aktif sebagai subjek sekaligus objek penting dalam kegiatan demokrasi. Misalnya pada pemilu dan pilkada, maupun

¹Fadhilah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 914.

kegiatan politik lainnya, keikutsertaan masyarakat muslim bisa dikatakan menjadi titik penentu dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Tidak keliru untuk menyatakan bahwa pemilu dan pilkada tidak akan berlangsung dengan baik tanpa keterlibatan dan kesediaan masyarakat muslim untuk berpartisipasi. Meskipun tidak semua memperjuangkan aspirasi umat Islam, tetapi aktivitas politik masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah politik bangsa dari dekade awal kemerdekaan hingga kontemporer.² Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan pandangan relasi agama dan negara secara timbal balik.³ Dalam kehidupan sosial politik, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun dalam perspektif yang berbeda-beda. Disatu pihak, masyarakat muslim memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, agama akan mudah disalahtafsirkan dan disalahfungsikan. Sebagai ajaran moral, agama sejatinya berfungsi mengawal dan mengarahkan politik agar tidak berkembang dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada satu sisi, masyarakat Islam percaya pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik, sementara pada sisi lain, karena sifat Islam yang multi interpretatif, tidak ada pandangan yang monolitik mengenai bagaimana seharusnya

²Salah satu penyebabnya adalah persoalan interpretasi hubungan negara dan agama, sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan, karena didekati dari perspektif yang berbeda-beda. Dengan kata lain *starting pointnya* tidak sama. Selanjutnya lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 11.

³Nurcholish Madjid menyatakan bahwa hubungan Islam dan politik di Indonesia bagaikan suatu perjalanan sentimental karena melibatkan kekhawatiran harapan lama yang mencekam, namun tetap harus diperbincangkan dan dilakukan karena berbagai alasan dan keperluan. Sedangkan Bahtiar Effendy menyatakan hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia dalam perjalanannya tidak bisa dilepaskan dari sisi antagonisme dan kecurigaan satu dengan lainnya, Lihat, Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 3 Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, h. 60.

Islam dan politik diposisikan secara tepat, yang muncul justru pendapat yang sangat beragam.⁴

Paling tidak terdapat dua spektrum pemikiran terkait hubungan agama dan politik. Pertama, memposisikan sistem politik modern sebagai sesuatu yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. Golongan ini berpendapat bahwa satu-satunya cara menghadapi konsep politik modern adalah dengan menjadikan Islam sebagai nilai, ajaran dan aturan dalam kehidupan politik kenegaraan, bahkan Islam harus menjadi dasar negara.⁵ Kedua, pandangan yang akomodatif terhadap sistem politik modern. Islam tidak mengenal pola baku sistem politik yang harus diikuti umat Islam, kecuali seperangkat tata nilai etika (*ethic value*) sebagai pedoman dasar pengaturan tingkah laku (*sulûk*) dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya (*mu'âmalah*). Karakter Islam yang multi interpretatif ini menyebabkan partisipasi politik masyarakat muslim menjadi variatif, setidaknya dapat ditandai dari keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai tingkatan di dalam aktivitas politik.⁶ Meminjam Michael Rush, keterlibatan ini dalam dua bentuk yaitu: pertama, partisipasi aktif dapat dicirikan sebagai sikap masyarakat yang terlibat secara aktif dengan diskusi politik informal oleh individu-individu, baik itu di lingkungan keluarga, tempat bekerja, atau segala tempat

⁴Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 69; M. Dhiauddin Rais, *Al-Nazhariyâtu as-siyâsatul islâmiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.4-6; Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 192; Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah, Salah Faham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h.15-17; Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 130-204).

⁵Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1988), h. 13.

⁶Menggunakan analisis Damsar, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya lihat, Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 179; Michael Rush dan Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.

yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan. Kedua, partisipasi pasif adalah kelompok masyarakat yang sangat sedikit membicarakan politik, meskipun memiliki minat terhadap perkembangan politik.⁷

Partisipasi politik merupakan faktor penting dalam suatu pengambilan keputusan, tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Apapun yang diputuskan pemerintah menyangkut kehidupan warga, maka masyarakat sejatinya harus diikutsertakan dalam menentukan keputusan politik tersebut.⁸ Kenyataannya tidak sedikit warganegara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian terhadap aktivitas politik.. Menurut Morris Rosenberg paling tidak ada tiga alasan munculnya sikap apatis masyarakat dalam kehidupan politik. Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Kedua, aktivitas politik dipandang sebagai pekerjaan yang sia-sia. Ketiga, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsang politik”. Dengan kata lain, seseorang memiliki kecenderungan apabila kebutuhan material dan immaterial tidak akan diperoleh ketika akan melakukan aktivitas politik, maka yang bersangkutan cenderung tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁹

Secara sosiologis, masyarakat muslim Indonesia, sulit untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan, termasuk kehidupan politiknya. Kontribusi, partisipasi dan perilaku sosial politik muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hal yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Keinginan masyarakat muslim untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam -moral Islam dan teori etika politik- sebagai perilaku dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, bahkan menjadikan syari'ah Islam sebagai

⁷Michael Rush dan Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik* (PT. Rajagrafindo Persada, 1993) h. 129.

⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 140.

⁹Sebagaimana dikutip Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 179.

dasar negara, adalah hal yang wajar meskipun melahirkan ketegangan-ketegangan hubungan politik antara agama disatu sisi dan negara disisi lain.¹⁰ Sebagai sebuah proses, pengejawantahan pemahaman agama Islam berupa ajaran-ajaran moral dan etika politik yang berkaitan dengan soal-soal kenegaraan itulah yang disebut sebagai realitas politik Islam. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.¹¹

Sikap dan perilaku serta budaya politik Islam bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spritual Islam. Menggunakan pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuan politik James Piscatori, Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan tersebut.¹² Menurut Smith ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik yaitu: 1) otoritas dogmatis atau kebenaran yang bersifat mutlak, 2) otoritas terarah atau ketuntasan pengaturan, 3) pelembagaan otoritas atau pepaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.¹³ Perilaku politik juga ditentukan oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama mencakup

¹⁰Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, h. 2; M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. 1), h. 21; M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995, cet. 1), h. 4.

¹¹M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000, cet.1), h. 3.

¹² Azyumardi Azra, Kata Pengantar dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius* (Bandung: Mizan, 2005, cet. 1), h. XVI.

¹³ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development An Analytic Study*, terj. Machnun Husein, *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 224.

identitas primordial, sakral, personal dan civilitas.¹⁴ Faktor primordial antara lain kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengekspresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah dan adat istiadat. Kesetiaan etnis (*ethnic loyalty*) misalnya masih tetap signifikan dan mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Bahkan loyalitas seseorang dalam mendukung partai politik atau figur misalnya tidak terlepas dari kesetiaan etnis.¹⁵

Sementara faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama, meskipun pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Sebagai *homo religius* manusia hidup dalam alam yang sakral, penuh nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci (*ultimate reality*) selanjutnya mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya. Meskipun muncul komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral tidak akan bisa hilang.¹⁶ Bahkan nilai-nilai sakral tersebut akan memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Sedangkan faktor personal biasanya disandarkan kepada ketokohan seseorang yang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, masyarakat melihat perilaku politik yang

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982), h. 44.

¹⁵ Leo Suryadinata, *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 182; R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik di Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), h. 22.

¹⁶Sastrapratedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 38; Charles F. Andrain, *Political Life and Social Change*, terj. Lukman Hakim, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 92.

diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutan dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Masyarakat yang masih kuat nilai-nilai budayanya, baik agama maupun adat istiadatnya secara sosiokultural cenderung memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal yaitu: dualisme antar kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan, dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan, dualisme yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai barat dalam masyarakat. Namun, apa yang disebutkan sebagai kecenderungan terakhir ini tetap saja tidak bersifat generalis, sebab sebagian kalangan masyarakat masih ada yang konsisten dengan pandangan politiknya sendiri.

Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi politik, tak pernah hadir di kehampaan budaya.¹⁷ Artinya perilaku politik seseorang atau kelompok dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti kebutuhan akan sistem nilai dan budaya yang dianut. Apabila seseorang atau kelompok hidup dalam sebuah budaya materialistik umpamanya, kecenderungan budaya politik yang tumbuh tentu saja berorientasi kepada budaya politik materialistik. Budaya politik biasanya akan berlaku selama periode tertentu. Karena apabila terjadi perubahan penting dalam konstelasi budaya maka dapat dipastikan pula bahwa budaya politik juga akan ikut mengalami perubahan. Dalam konteks budaya tidak ada yang abadi, melainkan semuanya sangat tergantung pada perubahan yang ada dalam kehidupan. Budaya politik sangat erat kaitannya dengan politik, karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana politik itu berlangsung, tetapi budaya itu sendiri menentukan bagaimana seseorang memaknai pesan politik. Budaya menjadi landasan

¹⁷R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Baru, 1997), h. 4.

bagi individu, kelompok pada saat mengakomodasi politik, artinya bila politik beragam tentu akan beraneka ragam pula persepsi terhadap politik. Oleh sebab itu, penulis melihat sangat relevan untuk melakukan kajian terhadap orientasi perilaku politik masyarakat muslim, tradisional.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi pokok masalah dalam kajian ini adalah: Bagaimana Orientasi Perilaku Politik Muslim Tradisional. Jawaban terhadap pokok masalah tersebut merupakan pokok pembahasan ini. Agar pembahasannya lebih mendalam, maka pokok masalah di atas dijabarkan kedalam sub pokok masalah, yaitu: bagaimana perilaku keberagaman muslim tradisional, dan bagaimana orientasi perilaku politik muslim tradisional.

B. Kajian Teori

Konsepsi Studi Perilaku

Mengkaji manusia dan perilakunya akan sangat memungkinkan untuk menggunakan berbagai pendekatan maupun perspektif. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas manusia itu sendiri. Perilaku manusia bila dilihat dari kaitannya dengan struktur-struktur masyarakat maupun budaya, maka perilaku manusia masuk dalam kajian sosiologi.¹⁹

Individu dan masyarakat adalah dua entitas yang saling mempengaruhi, akan tetapi ketika akan merumuskan mana yang paling berpengaruh, muncul kesulitan apakah keduanya saling mempengaruhi, mendominasi atau justru masing-masing berdiri sendiri

¹⁸Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di tengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 91; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 242; Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 223.

¹⁹Veeger, K.J., *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 3

tidak memiliki hubungan secara timbal balik. Paling tidak ada dua kecenderungan yang muncul yaitu menekankan masyarakat disatu sisi, dimana masyarakat dipandang memiliki realitas dalam dirinya yang membuatnya eksis dan berdiri sendiri, berkembang dan tegak menurut hukum tanpa tergantung kepada anggotanya. Di sisi lain adalah kecenderungan pada eksisnya individu. Mengutip pandangan Emile Durkeim lebih menekankan pada pengaruh masyarakat atau struktur atas individu. Masyarakat yang membentuk individu bukan sebaliknya, masyarakatlah yang melakukan kontrol terhadap manusia.²⁰ Ketika August Comte menjelaskan tahap-tahap perkembangan intelektual manusia terlihat dengan jelas bagaimana ia memberi penekanan budaya dalam kenyataan sosial. Dalam pandangannya manusia berkembang secara evolusioner dari tahap teologis (percaya kepada kekuatan dewa), melalui tahap metafisik (percaya kepada kekuatan abstrak) hingga tahapan positivistik (percaya pada ilmu sains). Pandangan evolusioner ini mengasumsikan bahwa masyarakat, seperti halnya organisme, berkembang dari sederhana menjadi rumit. Demikian juga Parsons dengan teori fungsionalismenya menekankan faktor-faktor sosial membantu mengarahkan tindakan-tindakan individu, menekankan pengaruh struktur pada individu.²¹ Secara sosiologis norma-norma diterima karena berguna dalam mengambil keputusan atau tindakan-tindakan individu. Norma-norma termasuk nilai-nilai, diterima secara umum dan ide-ide yang mempengaruhi pilihan dan alat-alat untuk mencapai tujuan.

Agak berbeda dari *mainstream* di atas adalah pandangan Weber, masyarakat atau institusi-institusi bukanlah yang paling utama dalam menentukan perilaku, tetapi

²⁰Lihat Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 168; Bandingkan, Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994), h. 177

²¹ Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 172

keyakinan, motivasi individu dan tujuan. Bagi Weber kenyataan sosial adalah sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial dapat dipahami dengan memahami niat, ide, nilai dan kepercayaan sebagai motivasi sosial.²² Arah pemikiran ini menekankan faktor determinan terhadap aktivitas individu dan memandang tindakan individu yang melahirkan struktur, penekanannya adalah pada kesadaran dan kreativitas individu dibandingkan dengan tekanan struktur.

Perilaku yang dipahami sebagai tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri mempunyai bentangan yang sangat luas baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika.²³ Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua :

a. Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

²² Laeyendecker, L, Tata, *Perubahan dan Ketimpangan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h. 316

²³ Notoatmodjo, Soekidjo & Sarwono, Solita, *Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan* (Badan Penerbit Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003), h. 23; Johnson & Mark P. Zanna, *The Handbook of Attitude*, (Routledge, 2005) h. 74

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.²⁴ Perilaku dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan, pengetahuan, kepercayaan. Misalnya, seseorang tanpa sadar terkadang menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. Sikap ini sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain yang paling dekat. Sikap membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain. Sikap positif terhadap tindakan-tindakan tidak selalu terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu, sikap akan diikuti oleh tindakan mengacu kepada pengalaman orang lain, sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasar pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang. Faktor lain yang cukup mempengaruhi perilaku seseorang adalah tokoh panutan yang keberadaannya sangat penting untuknya, maka apa yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk diikuti. Kebudayaan juga sangat berpengaruh dalam perilaku baik itu berupa perilaku, normal, kebiasaan, nilai-nilai di dalam masyarakat akan menghasilkan pola hidup atau paling tidak akan mempengaruhi. Biasanya pengaruh kebudayaan terbentuk dalam waktu yang lama dan selalu berubah, baik lambat ataupun cepat sesuai dengan peradaban umat manusia.

Konsepsi Politik dan Perilaku Politik

Mendefenisikan politik, Ramlan Surbakti menyebutnya sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama atau kepentingan umum dalam

²⁴Notoatmodjo, Soekidjo & Sarwono, Solita, *Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan*, h. 23

masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu.²⁵ Sedangkan menurut Miriam Budiharjo, politik adalah bermacam-macam dalam suatu sistem politik yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.²⁶ Menurut Wirson politik adalah salah satu aspek dari perilaku manusia yang berkisar pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, menjalankannya atau mempengaruhi orang lain, atau untuk memperlancarnya.²⁷ Sementara Harold Lasswell berpendapat esensi politik adalah kegiatan masyarakat yang berkisar pada masalah-masalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when and how*). Sesuatu yang digambarkan Lasswell sebagai suatu nilai, sehingga dapat dirumuskan sebagai siapa dengan apa yang dikeluarkannya dari proses politik dalam konteks nilai-nilai dan kapan serta bagaimana dia mendapatkannya.²⁸ Pengertian politik sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan cakupan politik sangat luas. Selain kegiatan pemerintahan, juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau individu dalam usahanya mempengaruhi proses politik dalam pemerintahan. Politik bukan semata-mata berkaitan dengan kegiatan partai politik, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Sedangkan perilaku politik secara semantik terdiri dari dua kata, yaitu kata “perilaku” dan “politik” yang kemudian seiring perkembangan ilmu politik istilah ini kemudian diformalkan sebagai bentuk politik atau bagian dari ilmu politik. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam menjelaskan pengertian perilaku politik ini maka terlebih dahulu istilah ini dilihat secara leksikal secara terpisah. Dalam Kamus Besar

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indoensia, 1992), h. 11

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), h.8

²⁷ SP. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 145

²⁸ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, h. 260

Bahasa Indonesia “perilaku” diartikan sebagai sikap dalam berbuat sesuatu,²⁹ dan “politik” adalah sikap kebebasan dalam menentukan pilihan.³⁰ Dari defenisi yang dikemukakan di sini jelas dapat dipahami bahwa perilaku politik adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang, individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Karena memang seorang individu atau kelompok memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya dalam menentukan pilihan politiknya untuk menemukan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Interaksi antar individu maupun antar kelompok baik secara horizontal maupun vertikal dalam kaitannya dengan proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan politik. Interaksi tersebut memunculkan berbagai macam perilaku yang berhubungan satu sama lain, baik dilakukan oleh lembaga maupun individu. Hal ini menggambarkan bahwa perilaku politik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Kajian perilaku politik merupakan salah satu dari bagian kajian sosiologi politik yang terpusat pada kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku manusia yang dapat dibedakan dengan perilaku ekonomi, perilaku agama, perilaku keluarga dan perilaku budaya. Perilaku politik berkenaan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, merupakan kajian sosiologi politik. Karena itu perilaku politik dibedakan dari perilaku manusia pada umumnya seperti perilaku ekonomi, perilaku agama, perilaku budaya dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku politik adalah salah satu aspek perilaku manusia yang bertujuan

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 121

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.23

untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, menjalankan, mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Siapa mendapatkan apa, bagaimana mendapatkan, kapan dan dimana, Tidak mengherankan jika perilaku politik seseorang, kelompok atau komunitas tertentu selalu berorientasi pada nilai atau pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku politik juga bertujuan menjangkau masa depan.

Sebagai sebuah proses, perilaku politik adalah hubungan timbal balik di dalam suatu negara antara pembuatan keputusan dengan warga negara biasa yang bertindak sebagai pihak yang hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik tersebut. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.³¹ Perilaku politik adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki hubungan dengan politik atau disebut kegiatan politik. Oleh karena itu perilaku politik dibagi dua, yakni perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah dan perilaku warganegara biasa. Kegiatan politik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga politik tersebut adalah tanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan kegiatan politik warganegara biasa adalah partisipasi politik.³²

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sebenarnya perilaku politik adalah kecenderungan cara memahami dan menginterpretasikan politik tersebut maka untuk itulah nampaknya tidak terlalu berlebihan kalau sebagian kalangan juga menginterpretasikan perilaku politik ini sama halnya dengan budaya politik karena keduanya sama-sama sangat dipengaruhi oleh segala bentuk kecenderungan yang ada,

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 15

³² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 16

terutama dalam wilayah-wilayah budaya kehidupan yang sepenuhnya membentuk kecenderungan yang pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

Model Perilaku Politik

Perilaku politik sebagai bagian dari studi ilmu politik tentu penting untuk mengetahui apa saja model perilaku politik yang berkembang. Sebab, model perilaku politik merupakan representasi dari kenyataan perilaku politik yang ada dan berkembang dalam kehidupan. Untuk itu, mendeskripsikan model perilaku politik ini menurut Ramlan Surbakti sedikitnya ada 3 (tiga) model perilaku politik yang sebenarnya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam upaya membentuk perilaku politik, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun yang dimaksud dengan aktor politik meliputi pemimpin, aktivis politik dan individu warga negara biasa. Sebab, aktor politik adalah orang-orang yang terlibat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis. Sedangkan agregasi politik adalah individu aktor politik secara kolektif, yang terdiri atas kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, dan lainnya yang sepenuhnya terlibat dalam wilayah politik. Dari semua itu sangat ditentukan oleh tipologi kepribadian politik yang mencakup tipe-tipe kepribadian seperti otoriter, machiavelianis dan demokrat dalam mewujudkan tujuan politik.³³

Dari ketiga kategori yang disebutkan menurut Ramlan Surbakti-terutama perilaku individu aktor politik- dipengaruhi faktor-faktor perilaku individu aktor politik, antara lain: (1) lingkungan politik tidak langsung, termasuk sistem politik, ekonomi, sosbud dan media massa, (2) lingkungan politik langsung, seperti agama, sekolah, kelompok pergaulan, 3) struktur yang tercermin dalam sikap individu, di

³³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 169

antaranya penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri dan, (4) faktor lingkungan sosial politik langsung seperti cuaca, keluarga, ruang kerja, suasana kelompok.³⁴

Tipologi Pemikiran Politik Masyarakat Muslim

Sejarah politik masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah politik bangsa Indonesia dari dekade awal kemerdekaan hingga kontemporer, meskipun tidak semua masyarakat muslim Indonesia memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim.³⁵ Hal ini tidak terlepas dari pemahaman yang berbeda-beda dalam memaknai watak holistik Islam.

Ada anggapan bahwa agama sebagai instrumen transendental dalam memahami dunia, Islam dipandang tidak hanya sekedar agama semata. Islam sering dipersepsi sebagai peradaban yang lengkap, masyarakat madani atau berhubungan dengan agama dan negara.³⁶ Nurcholish Madjid menyatakan bahwa hubungan Islam dan politik di Indonesia bagaikan suatu perjalanan sentimental karena melibatkan kekhawatiran harapan lama yang mencekam, namun tetap harus diperbincangkan dan dilakukan karena berbagai alasan dan keperluan.³⁷ Jargon "Islam, Yes; Partai Islam, No" yang dilontarkan Nurcholish Madjid telah memberikan kesadaran baru dikalangan umat Islam terhadap negara yang lebih berorientasi pada upaya memfungsikan nilai-nilai Islam untuk mengatasi persoalan masyarakat, kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan sosial dan lain sebagainya.

³⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 169

³⁵ Salah satu penyebabnya adalah persoalan interpretasi hubungan negara dan agama, sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan. Selanjutnya lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 11

³⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 61

³⁷ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 3
Demokrasi (Yogyakarta, Galang Press, 2001), h. xi

Amin Rais memberi penegasan bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Islam sebagai agama waahyu memberikan etik bagi pengelolaan kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam tidak harus diformalisasi dalam wujud negara Islam tetapi adanya kepastiaan terbentuknya sistem sosial politik yang merefleksikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Implementasi yang ditekankan adalah substantif bukan formalistik.³⁸

Sedangkan Bahtiar Effendi menyebutkan hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia dalam perjalanannya tidak bisa dilepaskan dari sisi antagonisme dan kecurgiaan satu dengan lainnya.³⁹ Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun dalam perspektif yang berbeda-beda. Disatu pihak, masyarakat memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, agama akan mudah disalahtafsirkan dan disalahfungsikan. Agama seharusnya menjadi arah dan petunjuk bagaimana politik dilaksanakan. Bukan sebaliknya agama dilegitimasi untuk membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Bahkan agama terdelegitimasi sebagai suatu hal yang tidak memiliki fungsi apapun dalam kehidupan politik. Akibatnya, agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas⁴⁰ atas berbagai penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya

³⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, h. 32

³⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*), h. 61

⁴⁰ Islam, sejak awal, dikenal sebagai agama pembebasan. Hal itu terlihat dari pembelaannya yang begitu gigih terhadap berbagai penindasan sosial. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sarat dengan berbagai simbol pembebasan dan pencerahan. Tujuan utama al-Qur'an adalah untuk mengeliminir segala bentuk penindasan, termasuk penindasan jenis kelamin, warna kulit, etnisitas, dan berbagai kelas lainnya di dalam masyarakat. Secara substansial, Islam sejak awal dipromosikan sebagai agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan masyarakatan. Intelektual Islam, Ali Syari'ati misalnya mengaskan bahwa agama bukanlah yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hanya sekadar

agama bisa disalahgunakan dan pada akhirnya berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam. Agama sebagai ajaran moral sejatinya berfungsi mengawal dan mengarahkan politik agar tidak berkembang dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁴¹ Pada satu sisi, hampir semua orang Islam percaya pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik, sementara pada sisi lain, karena sifat Islam yang multi interpretatif, tidak ada pandangan yang monolitik mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik diposisikan secara tepat, yang muncul justru pendapat yang sangat beragam.

Secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga paradigma yaitu integralistik, simbiotik dan sekuler. Dalam pandangan paradigma integralistik, agama dan politik menyatu, dimana Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam harus kembali kepada praktek kehidupan politik ketatanegaraan Islam yang dipraktekkan nabi Muhammad Saw., dan empat Khalifah. Tidak seharusnya meniru sistem ketatanegaraan yang dikembangkan di negara sekuler (barat). Dalam perspektif ini kedaulatan politik dilaksanakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan.⁴² Ada

hubungan antara hamba dengan Sang Khaliq, tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Syari'ati juga mengatakan Islam sejati tak mengenal kelas. Islam menjadi sarana bagi orang-orang yang tercerabut haknya, yang tersisa, lapar, tertindas, dan terdiskriminasi, untuk membebaskan diri mereka dari ketertindasan itu. Selanjutnya lihat, Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (t.tp, 2001), h. 294

⁴¹Al-Qur'an memberikan isyarat terkait nilai-nilai kemanusiaan, antara lain: Q.S. al-Baqarah : 48, 123, dan 282; Q.S. An-Nisa':58, 59; Q.S. Al-Maidah: 8, 42,44, 45, 47, 95, 106; Q.S. Al-An'am: 70, 152; Q.S. Al-Syuraa: 42; Q.S. Al-Anbiyaa: 73; Q.S. al-Baqarah : 48, 123, dan 282, S. An-Nisa' (4): 58; An-Nahl (16): 76,90; Q.S. Al-Hujurat : 9, serta S. ath-Thalaq : 2.

⁴²Lebih lanjut lihat, Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 69; M. Dhiauddin Rais, *Al-Nazhariyâtu as-siyâsatul islâmiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.4-6.

keharusan untuk mentaati pemimpin yang berkuasa –meskipun argumentum doktrinal kurang tepat- antara lain didasarkan kepada ayat:

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁴³

Paradigma simbiotik memandang bahwa antara agama dan politik memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama akan dapat berkembang, sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritual. Sampai pada poin ini tetap saja terlihat adanya kehati-hatian untuk tidak mempertegas hubungan antara Islam dan politik secara hitam-putih. Menggunakan analisis Bahtiar Effendy, bahwa kehati-hatian dalam membicarakan kaitan antara Islam dan politik disebabkan tiga hal yang saling berkaitan: (1) keterkaitan antara yang-setidak-tidaknya dianggap- sakral (agama) dan profan (politik), (2) konteks sejarah, keterkaitan antara Islam dan politik menyangkut soal ijtihad dan keikhlasan para pemikir dan aktivis Islam generasi pertama, (3) akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemikiran dan aktivisme politik Islam masa lampau.⁴⁴ Adalah hal menarik, diskursus hubungan Islam dan politik dikalangan umat Islam yang memunculkan berbagai paradigma, justifikasi Islam bukan hanya agama *un-sich* justru dinyatakan para orientalis. Antara lain V. Fitzgerald menyatakan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga sebuah sistem politik (*a political system*). Demikian juga C.A.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, QS An-Nisā/4: 59

⁴⁴ Lebih lanjut lihat, Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 69

Nallino menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (*a religion*) dan Negara (*a state*). Implikasinya adalah kesatuan fungsi pada diri Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi sekaligus sebagai pemimpin negara. Selanjutnya Schacht menyatakan Islam lebih dari sekedar agama, tetapi juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan politik. Demikian juga Macdonald menyatakan bahwa di Madinah dibangun Negara Islam pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam.⁴⁵ Adapun paradigma sekuler menganggap agama dan politik adalah dua entitas yang berbeda, dimana politik atau negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen tertentu. Dalam konteks Islam, pandangan ini menolak intervensi atau campur tangan agama pada masalah politik dan ketatanegaraan. Agama adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas politik. Para intelektual muslim yang memiliki kecenderungan kepada salah satu paradigma di atas seperti Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1862-1896 M), Rasyid Ridho (1865-1883 M), Ali Abdul Raziq (1888-1966 M), Al-Mawardi (975-1059 M), Ibn Taymiyyah (1262-1328 M), Ibn Khaldun (1332-1406 M), Al-Maududi (1903-1979 M), Al-Farabi (870-950 M).⁴⁶

Dalam konteks Indonesia perdebatan tentang hubungan Islam dan politik sudah muncul sejak kemerdekaan, polemik antara M. Natsir dan Soekarno misalnya dapat dilihat sebagai bukti ke arah itu. Natsir menolak pendaapaat tentang pemisahan agama dan negara. Menurut Natsir agama dan negara harus menyatu, tidak ada pemisahan

⁴⁵ Lebih lanjut lihat, Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, h. 69; M. Dhiauddin Rais, *Al-Nazhariyâtu as-siyâsatul islâmiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.4-6; Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thaha, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 192; Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah, Salah Faham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. 15-17; Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 130-204.

⁴⁶ Lebih lanjut lihat, Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55-172

antara keduanya. Islam memiliki konsep mengatur negara, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Islam tidak memisahkan antara agama dan negara.⁴⁷ Perdebatan tersebut memunculkan polarisasi pemikiran dalam melihat hubungan Islam dan politik. Secara garis besar dewasa ini terdapat dua model pemikiran politik Islam yang terkait hubungan agama dan politik. Pertama, pendapat yang memosisikan sistem politik modern sebagai sesuatu yang berlawanan dengan pemikiran politik Islam. Golongan ini berpendapat bahwa satu-satunya cara menghadapi konsep politik Barat adalah dengan menjadikan Islam sebagai nilai, ajaran dan aturan dalam kehidupan politik kenegaraan. Secara umum konsep politik yang dianut oleh golongan ini masih mengedepankan hukum Tuhan atau mengharapkan campur tangan Tuhan dalam urusan kenegaraan. Keyakinan mereka bahwa pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Manusia tidak memiliki karya akan tetapi dikaryakan sesuai mandat yang diterima dari Tuhan.⁴⁸

Kedua, adalah pandangan yang akomodatif terhadap sistem politik modern. Dasar pandangan ini adalah bahwa dalam Islam tidak terdapat pola baku tentang sistem politik yang harus dianut oleh umat Islam. Bahkan istilah negara (*al-da'ulah*) tidak ditemukan dalam Alqur'an. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar pengaturan tingkah laku (*sulūk*) manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya (*mu'âmalah*). Dalam AlQur'an ditemukan ungkapan-ungkapan yang semakna dengan kekuasaan politik, misalnya dalam ayat: "... dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk

⁴⁷ Selanjutnya lihat, Moch. Qasim Mathar, *Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru dalam Persepektif Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 75.

⁴⁸Selanjutnya lihat, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, h. 13.

dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”⁴⁹

Ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai indikator karena sifatnya insidentil dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap teori politik. Namun demikian pandangan kedua ini tetap mengakui Alqur’an sebagai kitab suci yang mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik, individu maupun masyarakat, misalnya keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁵⁰

Karakter Islam yang multi interpretatif tersebut, menyebabkan partisipasi politik masyarakat muslim menjadi variatif, setidaknya dapat ditandai dari keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai tingkatan di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Menggunakan analisis Damsar, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan.⁵¹ Keterlibatan ini dapat diidentifikasi pada dua bentuk, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat dicirikan dengan menggunakan istilah Michael Rush, sebagai sikap masyarakat yang selalu melibatkan dirinya secara aktif dengan diskusi politik

⁴⁹ QS . As-Sajdah (32) :24

⁵⁰Al-Qur’an merupakan rangkaian petunjuk bagi ummat Islam dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Al-Qur’an tidak hanya mengajarkan tentang ibadah baik hubungan seorang manusia dengan tuhanNya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran universal. Di sinilah salah satu letak kesempurnaan Al-Qur’an. Ajarannya meliputi semua nilai-nilai kebenaran universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh ummat muslimin dalam menuju kesempurnaan. Nilai-nilai universal yang tercakup dalam Al-Qur’an adalah nilai-nilai keadilan dan persaudaraan..

⁵¹ Menggunakan analisis Damsar, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya lihat, Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 179; Michael Rush dan Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23

informal oleh individu-individu, baik itu di lingkungan keluarga, tempat bekerja, atau segala tempat yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan. Sedangkan partisipasi pasif adalah kelompok masyarakat yang sangat sedikit membicarakan diskursus politik, tetapi tetap saja memiliki minat terhadap perkembangan politik. Partisipasi politik sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik yang bersangkutan termasuk kecenderungan pemikiran politik Islam yang dikembangkan.⁵²

Partisipasi politik merupakan faktor penting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Sesungguhnya yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan dan dinginkannya adalah orang atau komunitas yang bersangkutan. Apapun yang diputuskan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga, maka masyarakat sejatinya harus diikutsertakan dalam menentukan isi keputusan politik tersebut.⁵³ Adalah fakta sosial, jika dalam kehidupan politik, tidak sedikit warganegara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian terhadap aktivitas politik. Banyak alasan yang dikemukakan munculnya sikap apatis masyarakat dalam aktivitas politik. Menurut Morris Rosenberg paling tidak ada tiga alasan munculnya sikap apatis masyarakat dalam kehidupan politik. Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Kedua, aktivitas kerja dipandang sebagai suatu kerja yang sia-sia. **Ketiga, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak” atau disebut juga sebagai “perangsang politik”.** Kecenderungan seseorang apabila kebutuhan material dan immaterial tidak akan diperoleh ketika akan melakukan

⁵² Michael Rush dan Philip Althoff, *An Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23

⁵³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 140

aktivitas politik, maka yang bersangkutan cenderung tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.⁵⁴

Sebagai penduduk mayoritas, muslim Indonesia sulit untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Kontribusi, partisipasi dan perilaku sosial politik muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hal yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Keinginan komunitas muslim untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam -moral Islam dan teori etika politik- sebagai perilaku dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, bahkan menjadikan syari'ah Islam sebagai dasar negara, melahirkan ketegangan-ketegangan hubungan politik antara agama disatu sisi dan negara disisi lain. Sebenarnya untuk merumuskan hubungan ideal antara agama, sekaligus merumuskan ketarkaitan agama dengan aktivitas politik adalah dua hal yang dilematis, hal ini dipengaruhi oleh interpretasi dan budaya yang menjadi *mainstream* masyarakat.⁵⁵ Proses pengejawantahan pemahaman agama Islam berupa ajaran-ajaran moral Islam dan etika politik yang berkaitan dengan soal-soal kenegaraan itulah yang disebut sebagai realitas politik Islam. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada

⁵⁴ Sebagaimana dikutip Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 179

⁵⁵ Kesulitan dalam upaya mengembangkan sintesis antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara sejatinya tidak hanya dialami masyarakat muslim Indonesia, hal serupa juga dialami oleh negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan dan Aljazair. Ketegangan seringkali mewarnai hubungan politik antara agama dan negara sebagai konsekuensi logis dari upaya pengembangan sintesis dimaksud. Indonesia dalam sejarah panjangnya juga mengalami masa pasang surut hubungan Islam dan negara (pemerintah) dimulai masa orde lama sampai orde reformasi saat ini. Bahkan sesungguhnya pertentangan ini telah mempunyai akar-akar sejarah dan cultural yang telah lama. Analisis ini bisa dilihat dalam, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998, cet. 1), h. 2; M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. 1), h. 21; M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995, cet. 1), h. 4

nilai-nilai Islam.⁵⁶ Sikap dan perilaku serta budaya politik Islam bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spritual Islam. Menggunakan pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori, Azra menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan tersebut.⁵⁷

Dari beberapa kajian diketahui bahwa tipologi pemikiran politik Islam di Indonesia sebagaimana diungkap oleh Bahtiar Effendi dan M. Syafi'i Anwar sebagaimana yang dikutip Din Syamsuddin—terutama pada masa Orde Baru—sedikitnya membentuk tiga aliran yaitu: ⁵⁸

Pertama, formalistik yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam. Misalnya, signifikansinya partai politik Islam yang formal menggunakan nama Islam, simbol-simbol dan ungkapan serta idiom-idiom Islam dan landasan organisasi secara konstitusional Islam. Kelompok ini dapat dilihat pada awal masa Orde Baru sebagai kelompok yang menyerukan kembali kepada Piagam Jakarta.

Kedua, substantifistik yang menekankan pada pentingnya makna substansial dan menolak bentuk-bentuk pemikiran formalistik. Al-Qur'an telah memuat kebenaran-kebaran fundamental yang harus diimplementasikan melalui ijtihad. Mereka menekankan pada tuntutan manifestasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan pada kelembagaannya. Bagaimana menghadirkan doktrin agama secara terintegrasi antara wilayah sakral dengan temporal. Dalam konteks ketatanegaraan Islam

⁵⁶ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000, cet.1), h. 3

⁵⁷ Azyumardi Azra, Kata Pengantar dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, (Bandung: Mizan, 2005, cet. 1), h. XVI.

⁵⁸ Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), h. 152

dikembangkan doktrin bahwa Islam adalah agama dan negara (*al-Islâm huwa al-dîn wa ad-daulah*)

Ketiga, fundamentalisme yang cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik kontemporer. *Mainstream* ketiga ini menurutnya berbeda dengan dua *mainstream* yang lain dan menganggap keduanya telah gagal menunjukkan Islam sebagai jawaban dalam merespon sistem politik Indonesia. Kelompok fundamentalisme di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan fundamentalisme di dunia Islam. Kelompok ini sering digambarkan sebagai kelompok sempalan dengan sikap politik yang reaksioner, menentang penguasa dan menawarkan semacam alternatif. Karena kelompok ini menekankan pada karakter transformatif dari Islam maka mereka juga menghendaki transformasi masyarakat, baik secara revolusioner maupun evolusioner.⁵⁹ Pada spektrum tertentu dari politik Islam, perilaku ini membentuk dikotomis—Islam dan non-Islam—terhadap realitas, serta pemikirannya yang literer tentang doktrin agama, menunjukkan tingkat tertentu dari fundamentalisme keagamaannya.⁶⁰ Berkutat pada pemahaman yang literal sering sekali berdampak pada implementasi ajaran-ajaran agama yang cenderung *rigid*, doktrinal, kurang terbuka terhadap perkembangan pemikiran. Bahkan terkadang memandang pemahaman diluar komunitasnya sebagai kelompok yang keliru. Cenderung menjaga ajaran-ajaran yang diterima secara turun-temurun, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ppraktek sinkretisme dalam praktek keagamaannya. Untuk memotret hal ini tidak salah bila digunakan perspektif Seyyed Hossein Nasr dan Deliar

⁵⁹Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, h. 152

⁶⁰Ada empat hal yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat fundamentalisme sebuah kelompok muslim, yaitu (1) penekanan pada interpretasi harfiah terhadap teks-teks agama; (2) keterkaitan dengan sifat fanatik, eksklusif, intoleran, radikal, dan militan; (3) penekanan pada pembersihan agama dari isme-isme modern seperti liberalism, dan sebagainya; (4) klaim diri sebagai “penafsir agama” yang paling benar. Seperti diuraikan Ibrahim Abu Bakar, *Fundamentalisme Islam: Istilah yang dapat Menyesatkan*, dalam jurnal *Ulumul Qur’an*, no. 3 vol. IV, tahun 1993, h. 5

Noer. Seyyed Hossein Nasr, mengatakan gambaran mengenai Islam tradisional dapat dipahami melalui jalan pikirannya terhadap berbagai bidang dalam Islam. Islam tradisional menerima Alqur'an sebagai perkataan Tuhan dalam bentuk isi secara utuh dan sebagai bentuk penjelmaan perkataan abdi Tuhan yang tanpa permulaan waktu. Islam tradisional melindungi syari'ah seutuhnya sebagai hukum Tuhan dan menganggap sufi sebagai sebuah dimensi terdalam dari titik kebangkitan Islam. Sedangkan konsep Islam tradisional yang dikemukakan Deliar Noer adalah kelompok Islam yang masih mempertahankan tradisi sebagai bagian aktivitas keagamaannya. Menjelaskan kedua pandangan di atas, penulis mengutip pandangan Kacung Maridjan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Islam tradisional pengaruh kebudayaan lokal cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, bahkan secara kultural dapat dikatakan bersifat sinkretik.⁶¹

Dalam konteks di atas, Bahtiar Effendy menjelaskan setidaknya ada dua spektrum pemikiran politik di kalangan umat Islam, *Pertama*, yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara, konsep negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik dan kedaerahan, konsep demokrasi tidak sama dengan prinsip-prinsip *syûra* dan sebagainya.⁶² Konsepsi pemikirannya adalah formalistis. Model pemerintahan atau kekuasaan politik berada pada satu pemimpin atau khalifaah yang melampaui geografis maupun demografis yang dikenal pada konsep *nation-state*. *Kedua*, pemikiran bahwa Islam tidak memiliki pola baku tentang teori negara atau

⁶¹Selanjutnya lihat, Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 91 ;Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 242;Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 223

⁶² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999) h. 12

sistem politik yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Namun demikian, Al-Qur'an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia. Ajaran-ajaran ini mencakup prinsip keadilan, kesamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁶³ Perkembangan tipologi pemikiran politik ini sangat dipengaruhi tarik menarik kecenderungan budaya yang berkembang. Tipologi pemikiran politik ini juga berkembang seiring dengan perkembangan budaya yang ada di tengah masyarakat tersebut, apabila budaya yang berkembang menuju arah ideologis maka secara pasti pula tipologi pemikiran politik yang berkembang menuju politik ideologis.

C. Metode

Fokus utama kajian ini adalah mengenai orientasi perilaku politik muslim tradisional, sebagai upaya mempertahankan identitasnya, baik identitas etnik yang melekat sebagai ciri khas maupun identitas pola keberagamaannya. Agar tujuan kajian ini tercapai secara maksimal, dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan:

- (1) Historis, yaitu pendekatan dengan menggunakan peristiwa masa lalu sebagai bahan perbandingan.

⁶³ Salah satu nilai universal yang tercakup dalam Al-Qur'an adalah nilai-nilai keadilan. Kata 'adl (عدل) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an. Kata 'adl sendiri disebutkan 13 kali, yakni pada S. al-Baqarah (2): 48, 123, dan 282 (dua kali), S. An-Nisa' (4): 58, S. Al-Ma'idah (5): 95 (dua kali) dan 106, S. Al-An'am (6): 70, S. An-Nahl (16): 76 dan 90, S. Al-Hujurat (49): 9, serta S. ath-Thalaq (65): 2. Dalam konteks persaudaraan dan persamaan tergambar dalam sebuah hadits Nabi menegaskan: "Wahai manusia, sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit merah. Yang membedakan hanyalah taqwanya". Selanjutnya teks hadits ini dapat dilihat dalam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, 6 jilid (Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jilid V), h. 411; Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore: Johns Hopkins University, 1987), h. 10; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Nashihah al-Mulūk* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.), h. 9.

- (2) Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan analisis kondisi sosial masyarakat muslim tradisional, Dimana secara faktual mereka sebagian sudah berbaur dengan masyarakat urban yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya serta bahasa.
- (3) Antropologis, pendekatan ini digunakan untuk melihat kondisi masyarakat yang sangat majemuk dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, baik agama, suku, etnis dan bahasa.
- (4) Teologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauhmana doktrin keyakinan (agama) yang dianut masyarakat muslim tradisional mempengaruhi perilaku politiknya.
- (5) Fenomenologis, yaitu mengamati fenomena-fenomena konseptual masyarakat muslim tradisional melalui tindakan-tindakan dan pemikirannya. Penulis berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek sendiri.

D. Hasil dan Pembahasan

Perilaku Keberagaman Muslim Tradisional

Ada anggapan bahwa agama sebagai instrumen dalam memahami dunia, Islam dipandang tidak hanya sekedar agama semata, Islam dipersepsi sebagai peradaban yang paripurna, mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk masalah keberagaman dan politik. Bahkan bukan hanya umat Islam yang mengakui watak holistik Islam sebagai alat untuk memahami dunia. Islam adalah *view* dalam semua aspek kehidupan. Persoalannya adalah pengartikulasian dalam tataran praksis menjadi masalah, karena alas pijak yang digunakan untuk menginterpretasi keholistikan Islam tidak sama. Sebagian memahami pola hubungan Islam dan kenyataan sosial dalam pola legal dan formal. Sementara yang lain memaknai keholistikan Islam dalam perspektif

yang lebih substansialistik.⁶⁴ Hal ini tidak terlepas dari kehadiran Islam memiliki makna historis, tetapi pada saat yang sama pemahaman terhadap fenomena ini sangat tidak memadai. Ada kebutuhan untuk mendorong dan memprakarsai pemikiran yang berani, bebas dan produktif tentang Islam pada saat ini untuk merespon realitas yang terjadi.⁶⁵ Artinya agama tidak sekedar gejala sosiologis, sebab bagi penganutnya agama menyangkut masalah makna sebagai landasan untuk melihat realitas. Ada hubungan dialektis antara sistem makna yang dipercayakan agama dan pengertian yang dihayati oleh pemeluknya, yang secara obyektif terkait oleh konteks realitasnya. Misalnya, perubahan sosial-ekonomi dan politik dapat merupakan unsur yang menyebabkan terjadinya kemajemukan pemahaman terhadap doktrin secara utuh.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perilaku politik muslim tradisional, terlebih dahulu diuraikan mengenai pemikiran dan perilaku keberagamaannya yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku muslim tradisional dalam kehidupan yang lain, termasuk politik.

Tipologi Pemikiran Keagamaan Umat Islam Indonesia.

Pemikiran keberagaman umat Islam di Indonesia sejatinya telah berlangsung lama dan mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan keberagaman yang sangat dinamis di kalangan umat Islam. Munculnya pola pemikiran dan gerakan yang beragam itu, tentunya bertujuan untuk memberikan jawaban, reaksi ataupun sanggahan terhadap dinamika intern umat Islam itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dan gerakan tentunya tidak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di dunia lain.

⁶⁴Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 61-62.

⁶⁵Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam Today*, terj. Ruslani, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h. 4.

Artinya, agama tidak sekedar gejala sosiologis yang bisa dikategorikan secara sepihak. Bagi penganutnya, agama menyangkut masalah makna sebagai landasan untuk melihat dan memahami realitas. Ada hubungan dialektis antara sistem makna yang dipercayakan agama dan pengertian yang dihayati oleh pemeluk, secara obyektif tidak bisa menafikan konteks realitasnya. Hal inilah yang mendorong terjadinya kemajemukan pemahaman terhadap doktrin yang utuh tersebut.⁶⁶

Menggunakan analisis Fazlur Rahman, corak pemikiran dan gerakan yang berkembang di dunia Islam tidak terlepas dari corak pemikiran berikut: Pertama, revivalisme pra modernis atau revivalis awal, timbul sebagai reaksi terhadap dekadensi moralitas masyarakat Islam dan kebakuan pemikiran karena terjebak dengan pola tradisi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan. secara epistemologis menekankan pada Islam sebagai satu-satunya tujuan di atas segala-galanya. Kedua, modernisme klasik berusaha untuk menjelaskan bahwa Islam akan mengalami kejayaan apabila ditafsirkan dengan benar sesuai peradaban modern. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari fakta sejarah penyebaran kolonialisme hampir di semua dunia Islam. Pada fase inilah munculnya pernyataan bahwa Barat maju karena mengambil nilai-nilai ajaran Al-Qur'an, sementara Islam mundur karena meninggalkan ajaran-ajarannya sendiri. Ketiga, revivalisme pasca-modernis atau neo-revivalis, secara epistemologis berusaha melakukan purifikasi secara keagamaan, yaitu berusaha membersihkan Islam baik dari pengaruh-pengaruh barat-modern yang dianggap mencederai orisinalitas dan autentitas Islam sekaligus membersihkan Islam dari praktek-prakrek keagamaan yang dianggap bid'ah dan khurafat. Sehingga cenderung kembali kepada sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi. Hal ini sesungguhnya dapat dipandang sebagai reaksi umat Islam terhadap proses pembaratan. Dipandang perlu ada penegasan bahwa sesungguhnya

⁶⁶Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 10.

Islam adalah bersifat total dan mengandung wawasan, nilai dan petunjuk yang bersifat universal dalam bidang sosial, ekonomi, politik, individual maupun masyarakat secara umum. Pada fase inilah munculnya sikap apologetik yang berlebihan sehingga menimbulkan komplik di internal umat Islam. Keempat, neo-modernisme, yaitu berusaha mensintesakan progresifitas dari rasionalitas modernis dengan ijtihad dan khazanah tradisi klasik. Secara epistemologis, neo-modernisme berusaha menjelaskan bagaimana Islam menjawab tantangan modernitas dengan menggunakan dan berakar dari khazanah Islam klasik dengan penuh keterbukaan terhadap tradisi Barat-modern.⁶⁷

Menggunakan keempat tahap perkembangan pemikiran di atas, sebagai analisa terhadap pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia, akan tampak variasi dan pemaknaan yang berbeda. Pada awalnya dominasi dan karakterisasi tokoh, ulama dan pemikir Islam masih menjadi pemicu dan motor penggerak perkembangan pemikiran di Indonesia. Artinya, pola pemikiran yang disebutkan Fazlur Rahman tersebut tentunya bisa menjadi *milestone* dalam memaknai dinamika pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia.

Abudin Nata yang lebih khusus mengelaborasi mengenai tipologi pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia, mengelompokkannya kepada fundamentalis, reologis-normatif, eksklusif, rasional, transformatif, aktual, kontekstual, esoteris, tradisionalis, modernis, kultural, dan inklusif-pluralis. Tipologi pemikiran keislaman tersebut tentunya memberi gambaran begitu beragamnya corak pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia. Bila keseluruhan tipologi yang disampaikan oleh Fazlur

⁶⁷Greg Barton, *The Emergence of Neo-Modernisme: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia (A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq dengan judul *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, cet. Ke 1 (Jakarta: Paramadina, 1999), h.9; Awad Bahasoan, "Gerakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik", Prisma edisi ekstra, 1994, h. 109-111.

Rahman dan Abudin Nata dilihat dari substansi berpikirnya maka secara garis besar ada dua tipologi yaitu: 1) pola pemikiran keislaman yang berlandaskan pada ketentuan norma-norma keagamaan yang baku dan kaku, 2) pola pemikiran keislaman, selain berlandaskan pada teks-teks keagamaan juga melihat konteks kesejarahan ketika teks diwahyukan serta menarik pada konteks sekarang. Kedua pola inilah kemudian yang disebut sebagai Islam normatif dan Islam kultural. Bila menggunakan argumentasi dikotomik Deliar Noer, kedua pola di atas dinyatakan sebagai Islam tradisional dan Islam modernis.⁶⁸ Distingsi ini sesungguhnya bukan sekedar pemaknaan, tetapi landasan orientasi kedua kelompok ini sangat berbeda, baik dari segi isi atau substansi landasan pemikiran, melainkan juga lingkup dan intensitas permasalahan yang dihadapi. Paling tidak ada dua pola orientasi yang berbeda antara modernis dan tradisional. Pertama, orientasi ke luar terutama bagi kalangan modernis, ide-ide Barat dijadikan sebagai ukuran sekaligus sebagai tantangan dalam melakukan pembaharuan sosial. Dikembangkan semangat ijtihad yang memungkinkan tidak terjebak dalam pemaknaan yang sesungguhnya tidak dikuasai dengan tepat. Sementara orientasi kalangan tradisional lebih berorientasi ke dalam, berusaha mencari justifikasi perilaku keberagamaannya melalui argumentasi ajaran dan atau tradisi yang telah terkonstruksi mendahului masanya. Perubahan yang dianggap tidak prinsip dan sudah tertuang dalam ajaran dan atau tradisi tidak perlu dilakukan karena akan erubah arah dan orientasi implementasinya. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang tidak

⁶⁸Deliar Noer bukan satu-satunya sarjana yang mendistingsi pemikiran dan gerakan Islam, khususnya di Timur Tengah atau di anak benua India tetapi paling tidak bisa menjadi *milestone* dalam melihat perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia.

memberi kebebasan, tetapi dalam batas-batas yang terdapat dalam ajaran dan atau tradisi yang dilaksanakan turun temurun.⁶⁹

Muslim tradisional dimaknai dengan cara berpikir yang berkuat pada pemahaman literal, sering sekali berdampak pada implementasi ajaran-ajaran agama yang cenderung *rigid*, doktrinal, kurang terbuka terhadap perkembangan pemikiran. Bahkan terkadang memandang pemahaman diluar komunitasnya sebagai kelompok yang keliru. Cenderung menjaga ajaran-ajaran yang diterima secara turun-temurun, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya praktek sinkretisme dalam praktek keagamaannya. Menjelaskan kedua pandangan di atas, penulis mengutip pandangan Kacung Maridjan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Islam tradisional pengaruh kebudayaan lokal cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, bahkan secara kultural dapat dikatakan bersifat sinkretik.⁷⁰ Secara sosiologis Islam tradisional diidentikkan dengan Islam lokal serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam pemikiran serta praktek Islam.

Orientasi Perilaku Politik Muslim Tradisional

Sebagaimana disinggung di atas, pembentukan sikap dan perilaku politik secara sosiologis dipengaruhi oleh otoritas dogmatis atau kebenaran yang bersifat mutlak, otoritas terarah atau ketuntasan pengaturan, pelembagaan otoritas atau pemaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang

⁶⁹Awad Bahasoan, "Gerakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik", Prisma edisi Ekstra, 1994, h. 109-111.

⁷⁰Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di tengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 91 ; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 242; Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 223.

memperkuat struktur keagamaan.⁷¹ Perilaku politik juga ditentukan oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama mencakup identitas primordial, sakral, personal dan civilitas.⁷² Misalnya kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan dan adat istiadat. Ekspresi perilaku politik seseorang biasanya disandarkan kepada kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah dan adat istiadat. Kesetiaan etnis (*ethnic loyalty*) juga memiliki signifikansi dan mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Bahkan loyalitas seseorang dalam mendukung partai politik atau figur misalnya tidak terlepas dari kesetiaan etnis.⁷³ Hal ini secara umum ditemui pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kekerabatan, budaya dan situasi sosial yang dianut masyarakat tersebut.

Sementara faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keyakinan yang sama. Sebagai homo religius manusia hidup dalam alam yang sakral, penuh nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci (*ultimate reality*) selanjutnya mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya.⁷⁴ Meskipun muncul komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral tidak akan bisa hilang.⁷⁵ Bahkan nilai-nilai sakral tersebut akan memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Kenyataan ini terlihat

⁷¹ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development An Analytic Study*, terj. Machnun Husein, *Agama dan Modernisasi Politik, Suatu Kajian Analitis*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 224.

⁷² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982), h. 44

⁷³ Leo Suryadinata, *Penduduk Indonesia, Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 182; R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik di Indonesia pada Awal Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), h. 22.

⁷⁴ Sastrapatedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 38

⁷⁵ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 92

nyata bukan hanya pada ajaran-ajaran agama yang dianutnya, tetapi budaya-budaya sakral yang mengarah pada praktek sinkretis juga dijaga dan dipraktikkan secara turun temurun. Agama yang dianut seseorang diyakini mampu mempengaruhi cara pandang dan penilaian penganutnya tentang kehidupannya. Bila seseorang menjadikan agamanya sesuatu yang penting, maka dengan sendirinya semua aspek kehidupannya akan dilihatnya dari perspektif agama yang dianutnya. Dalam masyarakat yang masih kuat nilai-nilai budayanya, baik agama maupun adat istiadatnya secara sosiokultural cenderung memiliki elemen-elemen budaya yang bersifat dualis dalam pola-pola budaya politiknya. Dualisme tersebut secara garis besar berkaitan dengan tiga hal yaitu:

- (1) dualisme antar kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan,
- (2) dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dan keterbatasan,
- (3) dualisme yang merupakan implikasi masuknya nilai-nilai luar dalam komunitasnya.

Dualisme-dualisme di atas adalah implikasi masyarakat yang terbuka, dimana antar budaya saling bersinggungan bahkan ada yang ter subordinasi. Dualisme yang mengutamakan keharmonisan dan kedinamisan biasanya ditemukan dalam masyarakat

Namun, apa yang disebutkan sebagai kecenderungan terakhir, yaitu dualisme yang disebabkan implikasi masuknya nilai-nilai luar dalam komunitasnya tidak bersifat generalis, sebab sebagian masyarakat masih ada yang konsisten dengan pandangan politiknya sendiri. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku politik yang diperoleh melalui sosialisasi politik, tak pernah hadir di kehampaan budaya.⁷⁶ Artinya perilaku politik seseorang atau kelompok orang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti

⁷⁶ Selanjutnya dapat dilihat, R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 4

kebutuhan akan sistem nilai dan budaya yang dianut. Apabila seseorang atau kelompok hidup dalam sebuah budaya materialistik umpamanya, kecenderungan budaya politik yang tumbuh tentu saja berorientasi kepada budaya politik materialistik. Budaya politik biasanya akan berlaku selama periode tertentu. Karena apabila terjadi perubahan penting dalam konstelasi budaya maka dapat dipastikan pula bahwa budaya politik juga akan ikut mengalami perubahan. Dalam konteks budaya tidak ada yang abadi, melainkan semuanya sangat tergantung pada perubahan yang ada dalam kehidupan. Budaya politik sangat erat kaitannya dengan politik, karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana politik itu berlangsung, tetapi budaya itu sendiri menentukan bagaimana seseorang memaknai pesan politik. Budaya menjadi landasan bagi individu, kelompok pada saat mengakomodasi politik, artinya bila politik beragam tentu akan beraneka ragam pula persepsi terhadap politik.

E. Simpulan

Islam tradisional dimaknai dengan cara berpikir yang berkuat pada pemahaman literal, sering sekali berdampak pada implementasi ajaran-ajaran agama yang cenderung *rigid*, doktrinal, kurang terbuka terhadap perkembangan pemikiran. Bahkan terkadang memandang pemahaman diluar komunitasnya sebagai kelompok yang keliru. Cenderung menjaga ajaran-ajaran yang diterima secara turun-temurun, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya praktek sinkretisme dalam praktek keagamaannya. Menjelaskan kedua pandangan di atas, penulis mengutip pandangan Kacung Maridjan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Islam tradisional pengaruh kebudayaan lokal cukup kuat dalam implementasi ritual keagamaan, bahkan

secara kultural dapat dikatakan bersifat sinkretik.⁷⁷ Secara sosiologis Islam tradisional diidentikkan dengan Islam lokal serta kaum elit kultur tradisional yang tidak tertarik dengan perubahan dalam pemikiran serta praktek Islam. Paradigma keberagamaan ini juga mempengaruhi perilaku politik muslim tradisional yang ditandai dengan pembentukan sikap dan perilaku politik dipengaruhi oleh otoritas dogmatis atau kebenaran yang bersifat mutlak, otoritas terarah atau ketuntasan pengaturan, pelembagaan otoritas atau pepaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.⁷⁸ Perilaku politik juga ditentukan oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama mencakup identitas primordial, sakral, personal dan civilitas.⁷⁹ Misalnya kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan dan adat istiadat. Ekspresi perilaku politik seseorang biasanya disandarkan kepada kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah dan adat istiadat. Kesetiaan etnis (*ethnic loyalty*) juga memiliki signifikansi dan mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Hal ini secara umum ditemui pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kekerabatan, budaya dan situasi sosial yang dianut masyarakat tersebut.

⁷⁷Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di tengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 91 ; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 242; Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 223.

⁷⁸ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development An Analytic Study*, terj. Machnun Husein, *Agama dan Modernisasi Politik , Suatu Kajian Analitis*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 224.

⁷⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982), h.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin (2010), *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan.
- Alim, Muhammad (2010), *Asas-Asas negara Hukum Modern dalam Islam Kajian komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogkarata: LkiS.
- Almond, Gabriel dan Verba (1990), *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara*, Bandung: PT. Bina Aksara.
- Apter, David E (1996), *Pengantar Analisis Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Aziz, Abdul (2011), *Chieftdom Madinah, Salah Faham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Azra, Azyumardi (2000), *Islam Substantif*, Bandung: Mizan.
- Buchori, Didin Saefuddin (2009), *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009.
- Budiardjo, Miriam (1999), *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pacasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Chilote, Ronald H., *Teori Perbandingan Politik, Penulusuran Paradigma*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Djazuli, H.A.,(2007) *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Duverger Maurice (2010), *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ebyhara, Abu Bakar (2010), *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Effendy, Bahtiar (1998), *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Fukuyama, Francis (2005), *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan (2002) , *Politik Indonesia: Transisi Menuju demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gellner, Ernest (1983), *Muslim Society*, Cambridge: Camridgege University Press.
- Hakim, Lukman (2004), *Perlawanan Islam Kultural*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2004
- Holt, Claire, et.al (1972), *Culture and Politic in Indonesia*, t.t., Itacha, 1972
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta
- Huntington, Samuel P.(2003), *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berkembang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution (2010), *Pemikiran politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada media Group

- Madjid, Nurcholish (1999), *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina
- Mathar, Moch. Qasim (2011), *Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru dalam Persepektif Islam*, Makassar: Alauddin Press, 2011
- Mulkhan, Abdul Munir (1989), *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965 – 1989 dalam Perspektif Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press
- Prihatmoko, Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Rais, M. Dhiauddin (2001), *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Rush, Michael dan Althoff, Philip (2001), *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Surbakti, Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Tahqiq, Nanang (ed.) (2010), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2010
- Thoha,Miftah (2010), *Birokrasi & Politik di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada